



# Accountability Brief

Tim Penulis:  
Helmizar  
Sukmalalana  
Andri Oktaviani

2022

Komisi V

## Efektivitas Pengelolaan PNBP atas Pelayanan Registrasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor di Kementerian Perhubungan

### 1. Isu Strategis

Terwujudnya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan, persyaratan teknis dan uji berkala Kendaraan Bermotor (KB) melalui uji tipe, termasuk setiap jenis KB yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas harus melakukan uji secara berkala, diatur oleh UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam PP Nomor 55 Tahun 2012 menyatakan bahwa unit pelaksana uji tipe dibentuk oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut, dalam struktur organisasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah dibentuk Direktorat Sarana Transportasi Jalan serta Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) di bawah Ditjen Hubdat. Pelaksanaan uji tipe terdiri atas pengujian fisik dan penelitian rancang bangun dan rekayasa KB. Setelah dilakukan pengujian tipe, masing-masing KB wajib dilakukan registrasi uji tipe dengan diterbitkan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT).

Atas pelayanan penerbitan SRUT bagi setiap kendaraan bermotor yang diproduksi/diimportir oleh produsen/importir yang diterbitkan oleh Direktorat Sarana Hubdat, Kemenhub memperoleh PNBP sesuai PP No. 11 Tahun 2015 dan perubahannya yaitu PP Nomor 15 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Perhubungan. PNBP yang bersumber dari SRUT memiliki nilai yang material. Hasil pemeriksaan BPK tahun 2017 atas kinerja pelayanan Uji Tipe dan Registrasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor pada Kemenhub telah memberikan dampak berupa peningkatan realisasi PNBP SRUT yang signifikan pada tahun 2018 dan 2019, masing-masing sebesar 121,78% dan 43,79%. Kemudian dalam Laporan Keuangan Kemenhub di tahun 2019 (*audited*) menyajikan informasi bahwa perolehan PNBP dari SRUT adalah senilai Rp1,21 triliun atau 86,79% dari total PNBP yang dikelola oleh Ditjen Hubdat, atau 12,80% dari total PNBP Kemenhub.

Realisasi PNBP Perhubungan Darat dari tarif penerbitan Sertifikat Uji Tipe (SUT) dan SRUT bagi setiap KB yang diproduksi/diimportir oleh produsen/importir sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari realisasi PNBP Perhubungan Darat Tahun 2019 dan Semester I 2020 sebagai berikut.

## Realisasi PNBP Perhubungan Darat Tahun 2019 dan Semester I 2020

No	Uraian	2019		Semester I 2020	
		Nilai (Rp)	(%)	Nilai (Rp)	(%)
1	Pendapatan Penjualan Pengelolaan BMN dan Badan Usaha	3.958.368.219,00	0,29	1.310.356.484,00	0,24
2	Pendapatan Administrasi dan Peningkatan Hukum	21.943.150.002,00	1,57	30.418.150.000,00	5,47
3	Pendapatan Jasa Transportasi Komunikasi dan Informatika	1.341.992.663.682,00	96,23	512.758.106.101,00	92,20
4	Pendapatan Bunga Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan	26.675.235.799,00	1,91	11.633.190.571,00	2,09
5	Pengembalian Pendapatan	(13.615.000,00)	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>1.394.555.802.702,00</b>	<b>100,00</b>	<b>556.119.803.156,00</b>	<b>100,00</b>

*Sumber: LK Kemenhub 2019 (audited) dan Laporan Realisasi PNBP Hubdat 2020*

Tabel di atas menunjukkan PNBP terbesar pada Ditjen Hubdat yaitu Pendapatan Jasa Transportasi Komunikasi dan Informatika tahun 2019 dan semester I 2020 senilai Rp1.341.992.663.682,00 dan Rp512.758.106.101,00 atau 96,23% dan 92,20% dari total PNBP Perhubungan Darat. Salah satu jenis PNBP yang signifikan adalah penerbitan SRUT untuk tahun 2019 senilai Rp1.232.449.600.000,00.

Berdasarkan data aplikasi *Vehicle Type Approval (VTA) Online*, terdapat enam (6) jenis kendaraan yang dikenakan tarif PNBP SUT dan SRUT, dengan rincian sebagai berikut.

### Realisasi PNBP SUT dan Surat Keputusan Rancang Bangun (SKRB) Tahun 2019

No	Uraian	Tarif (Rp)	Jumlah Kendaraan (Unit)	Total (Rp)
a	b	c	d	E = c x d
1	SUT Sepeda Motor	50.000.000,00	120	6.000.000.000,00
2	SUT Mobil Penumpang, Mobil Barang, Bus, dan Landasannya	75.000.000,00	306	22.950.000.000,00
3	SUT Kendaraan Khusus dan Landasannya	50.000.000,00	5	250.000.000,00
4	SKRB Mobil Penumpang, Mobil Barang	35.000.000,00	1.391	48.685.000.000,00
5	SKRB Bus	40.000.000,00	90	3.600.000.000,00
6	SKRB Kereta Tempelan	20.000.000,00	45	900.000.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>1.957</b>	<b>556.119.803.156,00</b>

*Sumber: Data Aplikasi VTA Online*

### Realisasi PNBP SRUT Tahun 2019

No	Uraian	Tarif (Rp)	Jumlah Kendaraan (Unit)	Total (Rp)
a	b	c	d	E = c x d
1	Sepeda Motor	100.000,00	7.140.756	714.075.600.000,00
2	Mobil Penumpang	500.000,00	910.776	455.388.000.000,00
3	Bus, Mobil Barang, Kendaraan Khusus, dan Landasan	250.000,00	251.944	62.986.000.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>8.303.476</b>	<b>1.232.449.600.000,00</b>

*Sumber: Data Aplikasi VTA Online*

Hasil penelusuran terhadap tindak lanjut rekomendasi atas pemeriksaan sebelumnya, sampai dengan semester I tahun 2020 menunjukkan belum terdapat kejelasan atas pembayaran piutang tersebut. Selain itu, terdapat potensi bahwa PNBP penerbitan SRUT tahun 2019 senilai Rp1.232.449.600.000,00 termasuk di dalamnya merupakan pembayaran atas piutang PNBP SRUT dari LHP kinerja sebelumnya. Hal ini dikarenakan Ditjen Hubdat belum mengklasifikasikan pembayaran PNBP atas penerbitan SRUT pada tahun 2019, apakah merupakan pembayaran piutang atau pembayaran atas PNBP SRUT untuk tahun berjalan.

Permasalahan di atas terus berulang pada pengelolaan pelayanan registrasi uji tipe kendaraan bermotor. Hal ini dilihat dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan TA. 2018, TA. 2020 serta LHP Kinerja BPK atas pengelolaan pelayanan RUT KB pada Kemenhub dhi. Ditjen Hubdat di tahun 2016-2017 dan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan pelayanan RUT KB pada Kemenhub dhi. Ditjen Hubdat dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta di tahun 2019 dan Semester I 2020.

Meskipun permasalahan tersebut telah ditindaklanjuti dengan melakukan beberapa perbaikan dalam pelayanan RUT KB dengan pencapaian, yaitu:

1. Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2017 terkait kinerja pelayanan uji tipe dan RUT KB yang berdampak pada peningkatan realisasi PNBPN penerbitan SRUT yaitu sebesar Rp1.232,45 M pada tahun 2019, dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 yang hanya sebesar Rp386,46 M, atau naik Rp845,99 M (218,91%);
2. Dampak positif dari aplikasi E-SRUT dalam pelayanan penerbitan SRUT secara elektronik, yakni:
  - a. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan BPK kepada APM, pelayanan dengan E-SRUT memberikan layanan yang lebih cepat dan lebih mudah pada penerbitan SRUT; dan
  - b. Penyiadaan pengadaan blangko SRUT mampu memberikan efisiensi anggaran lebih kurang senilai Rp20,00 M/tahun.

Namun masih ditemukan beberapa permasalahan yang memerlukan perbaikan, baik dalam aspek pengawasan, pelayanan, maupun akurasi pencatatan PNBPN yang berasal dari registrasi uji tipe. Permasalahan-permasalahan tersebut berdampak pada belum optimalnya perolehan PNBPN dari pelayanan RUT KB, yaitu Kementerian Perhubungan belum mampu memastikan semua kendaraan bermotor telah dilakukan uji tipe dan registrasi uji tipe karena tidak adanya sistem pengendalian yang memadai. Seperti halnya belum adanya perbandingan data antara KB yang telah mendapatkan SRUT dengan data Karoseri /APM/IU mengenai data KB yang beroperasi di jalan sesuai Peraturan. Hal tersebut sulit dilakukan karena terkait dengan belum adanya petunjuk teknis terkait pelaporan bersifat elektronik terkait Laporan Karoseri/APM/IU mengenai data kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan.

Permasalahan lainnya belum tercapainya kerja sama integrasi data kendaraan bermotor, yaitu Kementerian Perhubungan belum dapat memperoleh data Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, sementara Kepolisian Negara RI belum memperoleh data SRUT. Permasalahan lainnya yang berdampak pada PNBPN SRUT, yaitu belum adanya unit kerja yang secara khusus melaksanakan tugas pengelolaan PNBPN di lingkungan Sekretariat Ditjen Hubdat melainkan dengan Pembentukan tim *ad hoc* pengelola PNBPN yang ditunjuk dari personel-personel yang ada, menimbulkan tugas rangkap dari setiap personel yang ditunjuk.

Dalam kebijakan sistem akuntansi pengelolaan PNBPN SRUT pun masih ditemukan beberapa permasalahan, antara lain belum adanya petunjuk teknis terkait mekanisme pelaporan produksi atau pelaporan penjualan Kendaraan Bermotor dari Wajib Bayar kepada Kementerian Perhubungan dan petunjuk teknis yang mengakomodir pengakuan dan pencatatan piutang dan hutang yang muncul di dalam aplikasi VTA terkait pengelolaan PNBPN SRUT serta belum membuat kebijakan terkait rekonsiliasi antara aplikasi VTA online dengan Simponi.

Dari sisi pelayanan registrasi uji tipe yang efisien, cepat, serta mudah, belum dapat dilaksanakan secara optimal dikarenakan beberapa permasalahan seperti belum adanya prosedur pengendalian akses pada sistem aplikasi VTA *online*, belum tersedia prosedur *back up* data dan aplikasi, serta belum memiliki rekam jejak audit.

## 2. Rekomendasi

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut di atas. Maka perlu kiranya menjadi perhatian bagi Komisi V DPR RI untuk mendorong dan memastikan agar Kementerian Perhubungan melakukan langkah perbaikan terutama dalam aspek pengawasan, aspek

pelayanan, dan aspek akurasi pencatatan terhadap pengelolaan PNBP atas pelayanan RUT KB (registrasi uji tipe Kendaraan Bermotor), terdapat saran perbaikan, sebagai berikut:

- Aspek pengawasan diperlukan penyusunan mekanisme kerja dan/atau pedoman teknis terkait tata cara pelaporan elektronik untuk data jumlah produksi kendaraan oleh Karoseri/APM/IU; adanya kerja sama integrasi dan pertukaran data Kendaraan Bermotor dengan Polri, Kementerian Perindustrian, dan/atau Kementerian Perdagangan; penyusunan aturan lanjutan terkait mekanisme pengenaan sanksi secara administrasi terhadap Karoseri/APM/IU yang tidak mengajukan registrasi uji tipe dalam peraturan menteri; adanya tindak lanjut yang intensif dalam kerja sama integrasi data Kendaraan Bermotor dengan Kepolisian Negara RI, sehingga dapat terlaksana integrasi data dua arah antara data SRUT dari Kemenhub dengan data informasi Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dari Polri; dan diperlukan pembentukan unit kerja yang secara khusus melaksanakan tugas pengelolaan PNBP di lingkungan Sekretariat Ditjen Hubdat;
- Aspek pelayanan diperlukan adanya koordinasi antara Dirjen Perhubungan Darat dengan intansi terkait (Putikom) untuk menyusun prosedur operasional standar atas pengendalian akses, rekam jejak audit, prosedur *back up* data dan aplikasi pada sistem VTA *online* serta menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan prosedur tersebut;
- Aspek akurasi pencatatan diperlukan adanya regulasi sistem akuntansi yang mengakomodir pengakuan dan pencatatan hutang, piutang dan pendapatan diterima dimuka yang muncul pada aplikasi VTA online terkait pengelolaan PNBP SRUT; identifikasi dan verifikasi kembali atas nilai potensi kekurangan penerimaan PNBP SRUT sampai dengan 31 Desember 2020 dan melakukan penagihan atas nilai piutang yang telah ditetapkan; dan diperlukan adanya koordinasi dengan Pustikom dalam rangka menyusun kebijakan terkait rekonsiliasi antara data aplikasi pada VTA online dengan data pada Simponi.

### 3. Referensi

Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja BPK RI atas Efektivitas Pengelolaan Registrasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan Instansi terkait lainnya di DKI Jakarta Tahun 2019 dan Semester I 2020 (IHPS I Tahun 2021).